



LAPORAN KINERJA PEJABAT DAN STAF

DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyam sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit di Dinas Sosial Kabupaten Jember kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.

Jember, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember



Akhmad Helmi Luqman, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19760507 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	6
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	8
E. SARANA PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER.....	9
F. ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER.....	10
G. ISU STRATEGIS.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS.....	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
D. ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN TAHUN 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	23
B. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	24
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	29
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	53
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ..	54
F. REALISASI ANGGARAN.....	57
BAB IV PENUTUP	62

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Capaian Kinerja SASARAN Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2021– 2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS

Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial

Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **tinggi**. Disamping capaian kinerja yang memuaskan, perbaikan tata kelola dan penerapan pelayanan publiknya,. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial berhasil mendapatkan penghargaan antara lain :

- Penghargaan penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 ;
- Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kategori Pelayanan Prima ;

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 57.817.764.115,-, yang dibagi menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.514.163.296,- Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 52.007.610.219,-, dan Belanja Modal sebesar 1.295.990.600,-. Dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.695.556.279,- atau 87.52 % dari pagu anggaran. Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan anggaran tidak terserap 100 %, dikarenakan ada beberapa anggaran belanja yang tidak bisa dilaksanakan (kesalahan pada kode rekening dan kendala teknis lainnya).

Kendala atau hambatan yang dialami dalam pelaporan dan pengukuran target –target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain :

- 1). Permasalahan pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial:
 - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan sosial
 - Kemampuan dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
- 2). Permasalahan pada sasaran Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Data calon penerima bantuan masih belum akurat
 - Belum terlaksananya kegiatan yang mendorong kemandirian dan produktifitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Restorasi Sosial
 - Kemampuan dan kualitas SDM Non ASN penjaga 15 Taman Makam Pahlawan yang perlu ditingkatkan
 - Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 15 Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Jember
- 4). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
 - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan baik itu rutin maupun program kegiatan prioritas yaitu bantuan dan pelayan sosial bagi PMKS;
 - Perencanaan kegiatan yang masih belum optimal khususnya untuk bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS.

Dan rencana aksi Dinas Sosial Kabupaten Jember atas semua kendala/permasalahan diatas adalah :

- Mengadakan Bimtek/Pelatihan khusus bagi peningkatan SDM PSKS agar lebih optimal dalam membantu penanganan PMKS ;
- Mengadakan Bimtek bagi peningkatan SDM Karyawan ASN dan Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih optimal dan memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PMKS ;
- Peningkatan verifikasi dan verifikasi DTKS di 31 Kecamatan ;
- Peningkatan Assesmen calon penerima manfaat dengan turun langsung ke wilayah/door to door;

- Menyusun program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS guna mewujudkan kemandirian PMKS
- Sinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar ikut berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PMKS
- Manajemen anggaran pada TW I s/d IV (monitoring dan evaluasi) juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan di Bidang Sosial
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah
- (3) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penanganan Bencana, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6). Uraian Tugas dan Fungsi :
 - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dan fungsi antara lain :
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di laporan lingkungan dinas;
 3. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

4. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
 5. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak-anak terlantar yang meliputi perjangkauan, rujukan dan pemantauan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial serta tugas lain, dan fungsi : perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan, koordinasi, monitoring evaluasi, meliputi : kewirausahaan sosial, penyuluh sosial, partisipasi sosial, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan , sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - e. Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana alam dan sosial kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan kebijakan teknis penanganan bencana, pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana , koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana serta taruna siaga bencana, penyelenggaraan penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus kelompok rentan dan LDP, pemberian bimbingan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
 - f. UPT Liposos tugas dan fungsi melaksanakan bantuan dan pelayanan sosial pada klien Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional tugas dan fungsi memberikan pelayanan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Sosial Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 24 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 87 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 65 orang atau 73 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1			1		1	
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	5				3	2	5			3	2	4	1
2. Pengawas	2				2		2			2		1	1
3. Pelaksana	6	3	1	1			6	3	1	1		6	
Jabatan Fungsional	9				8	1	9			8	1	4	5
P3K	1				1		1			1			1
Non ASN	64		39	8	17							52	12
Jumlah	87	3	40	9	32	3	24	3	1	16	3	71	17

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kab Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Sosial Kabupaten Jember

E. SARANA PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Sosial Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Tawes 306 Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Sosial Kabupaten Jember cukup memadai, karena sarana prasarana penunjang kegiatan kantor telah tersedia, Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Bangunan Gedung Kantor (Liposos)	1	Kurang Layak	6
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Cukup Layak	2
3	Bangunan Gedung/Garasi	1	Cukup Layak	2
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Cukup Layak	1
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	Cukup Layak	3
6	Laptop	24	Layak	28
7	Komputer PC	12	Layak	18
8	Printer	23	Layak	25
9	CCTV	6	Layak	12
10	Kendaraan Pejabat	4	Layak	4
11	Kendaraan Operasional	7	Layak	7
12	Kendaraan Roda 2	24	Layak	24
	Jumlah	106		132

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024

Sarana prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan kondisi yang cukup layak, namun tidak halnya dengan sarana prasarana UPT Liposos, sebagai pendukung pelayanan pada klien/PPKS, bangunan rumah singgah/ruang klien kurang memadai, karena kapasitasnya tidak dapat menampung jumlah klien yang over load (hasil razia grobyokan PPKS dll), dan juga belum tersedianya ruang klien untuk ODGJ, Penyakit Menular, Lansia, isolasi ODGJ Ekstrim, ruang Kesehatan dan alat medis penanganan pertama pada klien, rumah singgah, ruang konseling, ambulance, sarpras kebersihan klien, dan artesis.

F. ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.923.611.115,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	9.029.033.415,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.241.340.296,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.241.340.296,-
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	664.540.119,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.415.200,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.109.400,-
	Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	154.136.700,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.290.000,-
	Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	64.587.819,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000,-
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.347.568.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.300.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.078.718.500,-
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.584.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.500.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.000.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.084.500,-
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	820.205.000,-
2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	820.205.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	274.960.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545.245.000,-
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.755.653.000,-
3.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.383.953.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	251.600.000
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.208.573.000,-
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	923.780.000
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	371.700.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	152.820.000,-
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	218.880.000,-
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	33.101.881.700
4.1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

4.2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.101.881.700,-
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.538.400,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	32.778.543.300,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	78.800.000,-
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	12.000.000.000,-
5.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	12.000.000.000,-
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.000.000.000,-
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	216.838.000,-
6.1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-
	JUMLAH	57.923.611.115,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kab Jember Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Upaya optimalisasi verifikasi dan validasi data PPKS agar mendapatkan data yang akurat guna ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PPKS;
2. Upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember agar PPKS mengalami penurunan secara kuantitas, dan meningkat kemandirian dan kesejahteraanya;
3. Upaya optimalisasi rehabilitasi sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
4. Upaya pemenuhan sarana prasarana yang memadai pada UPT Liposos dalam optimalisasi pemberian bantuan dan pelayanan pada PPKS/Klien Liposos;
5. Upaya optimalisasi pemberdayaan pada PSKS dengan ditingkatkan kemampuannya dalam membantu penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Fasilitasi, bimbingan, dan penyediaan sarana dan prasarana Peningkatan kompetensi SDM PSKS ;dan
6. Upaya optimalisasi perbaikan sarana prasarana 15 TMP di Kabupaten Jember agar bisa difungsikan sebagai wisata religi dan edukasi bagi Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu

Misi : Menuntaskan Kemiskinan struktural dan kultural disemua wilayah
Tujuan : Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya

Indikator Tujuan 1 : Presentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang berdaya	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Prosentase PPKS yang menerima bantuan Kebutuhan Dasar	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	90.4%
Meningkatnya Retorasi Sosial	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2022-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Kinerja Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2022-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data PSKS
		<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSKS adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. PSKS merupakan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dapat berperan dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat kesejahteraan sosial. - PSKS berdaya adalah PSKS yang memenuhi kategori sebagai pendamping sosial dalam membantu penanganan PPKS yakni yang bertanggung jawab, berkompeten dan mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai pilar yang sangat strategis dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang sosial 		
Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Menerima Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Bidang Penanganan Bencana 4. UPT Liposos 	<ul style="list-style-type: none"> • Data disabilitas, lansia, anak PPKS, anak yatim, gelandangan pengemis, dan fakir miskin yang menerima bantuan kebutuhan dasar • Data liposos

		<p>Penjelasan : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan wajar. Hal ini disebabkan oleh hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial.</p> <p>- Jenis jenis PMKS : PMKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anak balita terlantar -Anak terlantar -Anak yang berhadapan dengan hukum -Anak jalanan -Anak dengan disabilitas -Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah -Anak yang memerlukan perlindungan khusus -Lanjut usia terlantar -Penyandang disabilitas -Tuna susila -Gelandangan -Pengemis -Pemulung -Kelompok minoritas -Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan -Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) -Korban penyalahgunaan NAPZA -Korban trafficking -Korban bencana alam -Korban bencana sosial <p>- PPKS yang menerima Kebutuhan Dasar adalah PPKS yang menerima bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bantuan jaminan kesehatan (PBID/PBIJKN) - bantuan Program Keluarga Harapan - bantuan pangan non tunai - bantuan permakanan - bantuan paket sembako - bantuan alat kesehatan - bantuan sandang, dan 		
--	--	--	--	--

		- bantuan langsung uang tunai/BLT-DBHCHT		
Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Formulasi Kebijakan : $\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dirawat}}{\text{Jumlah Keseluruhan Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data TMP di Kab Jember
		Penjelasan : TMP yang dirawat adalah TMP yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember. Pemeliharaan/perawatan antara lain : pengecatan pagar TMP, nisan dan bangunan TMP, pembenahan pagar dan bangunan yang ada di TMP		
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan : Program adalah program yang ada didalam DPA –PD, baik itu 1 (satu) program rutin maupun 5 (lima) program prioritas	Sekretariat	- Data LRA -Data Lap SIPPD

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Nomor : 065/58/35.09.315/2024, Tanggal 08 Januari 2024, Perihal : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.3 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2024

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab Kota	Rp.	8.923.186.415,-	Sumber Dana APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	2.755.653.000,-	Sumber Dana APBD
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	820.205.000,-	Sumber Dana APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	33.101.881.700,-	Sumber Dana APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp.	12.000.000.000,-	Sumber Dana APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	216.838.000,-	Sumber Dana APBD
	Jumlah	Rp.	57.817.764.115,-	

Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dikarenakan ada penambahan anggaran pada kekurangan tunjangan fungsional umum ASN, dan tambahan anggaran pada belanja gaji Non ASN Bulan Desember 2024, sebagaimana table Perjanjian Kinerja Perubahan berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.3 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab Kota	Rp.	9.029.033.415,-	Sumber Dana P-APBD
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	2.755.653.000,-	Sumber Dana P-APBD
3. Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	820.205.000,-	Sumber Dana P-APBD
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	33.101.881.700,-	Sumber Dana P-APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp.	12.000.000.000,-	Sumber Dana P-APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	<u>216.838.000,-</u>	Sumber Dana P-APBD
Jumlah	Rp.	57.923.611.115,-	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a). Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Sosial dengan Anggaran Rp. 820.205.000,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 820.205.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember.

b). Sasaran Strategis II : Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS. Didukung oleh :

- Program Rehabilitasi Sosial dengan Anggaran Rp. 2.755.653.000,-
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Anggaran Rp. 33.101.881.700,-
- Program Penanganan Bencana dengan Anggaran Rp. 12.000.000.000,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 47.857.534.700,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember

c). Sasaran Strategis III : Meningkatnya Retorasi Sosial Didukung oleh :

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp. 216.838.000,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 216.838.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember

d). Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab Kota Rp. 9.029.033.415,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 9.029.033.415,- yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	80%	100%	80%	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.3%	88%	100%	88%	99.55%
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : Data Dinas Sosial Kab Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember rata rata mencapai >80 % dan masuk dalam kategori tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang tinggi, dengan demikian maka secara umum Dinas Sosial Kabupaten

Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang sosial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Penjelasan data realisasi :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan data PSKS pada Tahun 2024 perhitungan realisasi sasaran 1 sebagai berikut :

Formulasi
Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan}} = \frac{6 \text{ Lembaga}}{8 \text{ Lembaga}} \times 100\%$$

$$= 80 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS

Formulasi
Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Menerima Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} = \frac{149.300}{168.304} \times 100\%$$

$$= 88 \%$$

Keterangan : Data PPKS adalah data pada LPPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kab Jember

Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial

Formulasi
Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah TMP yang Dirawat}}{\text{Jumlah TMP keseluruhan}} = \frac{15 \text{ TMP}}{15 \text{ TMP}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Formulasi
Perhitungan :

$$\frac{\text{Persentase Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Program keseluruhan}} = \frac{6 \text{ Program}}{6 \text{ Program}} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	62 %	75%	80%	80%
Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	71%	75%	90%	88%
Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Pencapaian Kinerja Daerah	Efektifitas Target Perangkat	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	100%	100%	100%
--	------------------------------	--	------	------	------	------

Sumber Data Realisasi : Dinas Sosial Kab Jember

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Pada Tahun 2021 sebesar 62%, kegiatan pemberdayaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum bisa dilaksanakan dengan optimal, dikarenakan anggran yang dialokasikan belum memadai. Dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 75%, tahun 2023 80% dan tahun 2024 sebesar 80%. Pada Tahun 2022 s/d 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan pemberdayaan pada PSKS dalam bentuk Bimtek peningkatan SDM PSKS, yang bertujuan agar PSKS lebih berkomitmen dan bertanggung jawab akan tugas dan fungsinya dalam membantu Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan PPKS di Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Pada Tahun 2021 sebesar 71%, kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan pada PPKS masih belum optimal dilaksanakan diakrenakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut kurang memadai. Tahun 2022 meningkat menjadi 75%, tahun 2023 80% dan tahun 2024 sebesar 88%. Pada Tahun 2022 s/d 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan pemberian bantuan dan pelayanan PPKS secara makmal dalam bentuk kegiatan : pemberian bantuan kebutuhan dasar (sembako, sandang, alkes, obat-obatan, jaminan kesehatan,bahan bangunan/peralatan/perlengkapan rumah, dll), bagi disabilitas, anak yatim, anak PPKS, lansia miskin, ODGJ, gelandangan pengemis, keluarga miskin dan keluarga rentan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial, Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Dari Tahun 2021 s/d 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan pemeliharaan pada 15 TMP di Kabupaten Jember, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari nasional (kerja bakti di TMP, renungan malam, upacara hari besar, tabur bunga dll).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Kegiatan pendukung oprasional rutin kantor telah dilaksanakan dengan maksimal.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	-	-
2	Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90.0%	-	-
3	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80%	-	-
4	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90.0%	-	-

Sumber Data: Realisasi : Dinas Sosial Kab Jember

Realisasi kinerja atas indikator Persentase PSKS yang Berdaya, Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar, Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dan Persentase Indikator Program yang Tercapai tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Sera pan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	820.205.000,-	749.503.800,-	91.38 %
	Kegiatan A.1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	820.205.000,-	749.503.800,-	91.38 %
	Sub Kegiatan :	545.245.000,-	493.543.800,-	90.52

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	274.960.000,-	255.960.000,-	93.09 %
Total		820.205.000,-	749.503.800,-	91.38 %
Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	2.755.653.000,-	2.423.221.070,-	88%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.383.953.000,-	2.116.833.570,-	88.80 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	251.600.000,-	207.200.000	82.35 %
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.208.573.000,-	1.110.601.070,-	91.89 %
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	923.780.000,-	799.032.500,-	86.50 %

	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	371.700.000,-	306.387.500,-	82%
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	152.820.000,-	102.787.500,-	67.26 %
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	218.880.000,-	203.600.000,-	93%
Total		2.755.653.000,-	2.423.221.070,-	88%
Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	33.101.881.700,-	31.667.074.624,-	95.67 %
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.101.881.700,-	31.667.074.624,-	95.67 %
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.538.400,-	7.080.000,-	2.90 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	32.778.543.300,-	31.627.844.624,-	96.49 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	78.800.000,-	32.150.000,-	40.80 %
Total		33.101.881.700,-	31.667.074.624,-	95.67 %

Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Program Penanganan Bencana	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24 %
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24 %
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24 %
Total		12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24 %
Meningkatnya Restorasi Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63 %
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63 %
Total		216.838.000,-	192.192.000,-	88.63 %
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.029.033.415,-	8.126.130.074,-	90.35 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.241.340.296,-	3.441.402.317,-	81.14 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.241.340.296,-	3.441.402.317,-	81.14 %
	Kegiatan Administrasi	664.540.119,-	415.237.142,-	62.48

	Umum Perangkat Daerah			%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.416.200,-	76.416.000,-	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.109.400,-	42.650.000,-	96.69 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154.136.700,-	86.814.331,-	56.32 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.290.000,-	144.489.681,-	45.11 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.587.819,-	63.317.130,-	98.03 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,-	1.550.000,-	31.00 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.347.568.500,-	2.797.809.594,-	83.58 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000,-	4.650.000,-	83.78 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.300.000,-	129.859.606,-	49.32 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.078.718.500,-	2.663.299.988,-	86.51 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	775.584.500,-	350.853.505,-	45.24 %

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.500.000,-	46.134.337,-	28.05 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.000.000,-	216.814.168,-	63.77 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,-	27.975.000,-	62.17 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.084.500,-	59.930.000,-	26.51 %
Total		9.029.033.415,-	7.005.302.558,-	77.59 %

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran ke satu : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial** adalah sebagai berikut :

1. Program: Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	545.245.000,-	493.543.800,-
Output	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	8	6

Kegiatan : Pemberdayaan lansia dari target 8 Lembaga terealisasi 1.547 orang, antara lain dalam bentuk kegiatan : pemberdayaan karang werda, LVRI, PWRI, LKS, karang taruna dan peningkatan kapasitas SDM PSKS yaitu bimbingan teknis pada TKSK

Kendala penyebab realisasi tidak mencapai target dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada sub kegiatan tersebut, serta kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dengan PSKS.

Dok : Hari Lanjut Usia



Dok : Pemberdayaan Lansia



Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp :	274.960.000	255.960.000,-
Output	Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan /kota	orang	1.500 orang	3.000 orang

Peningkatan kapasitas PSKS dengan target 1.500 orang dan terealisasi 3.000 orang, dalam bentuk kegiatan peringatan pemberdayaan lansia melalui peringatan Hari Lanjut Usia (HALUN) dengan diikuti kurang lebih 3000 lansia berdaya di Kabupaten Jember, bertempat di Gedung Serbaguna Jember, rangkaian acara tersebut adalah senam lansia, pemberian hadiah untuk kelompok lansia berprestasi, dan melibatkan pengurus dan anggota karang werda Se-Kabupaten Jember.

Dok : Peringatan Hari Lanjut Usia



Sasaran ke dua : Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS adalah sebagai berikut :

1. Program: Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	251.600.000,-	207.200.000,-
Output	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	100	100

Pemberian bantuan alat kesehatan berupa : kursi roda dan kruk bagi lansia miskin dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup lansia, meningkatkan kualitas hidup lansia dan membantu mereka tetap sehat dan terlibat dalam kehidupan sosial.

Dok : Pemberian bantuan alkes lansia



Sub Kegiatan Pemberian, Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.208.573.000,-	1.112.351.070,-
Output	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	orang	60	70

Penanganan klien liposos berupa pelayanan sosial klien yang ditampung di UPT liposos yaitu : pemberian permakanaan, obat-obatan, sandang, penelusuran keluarga , reunifikasi keluarga, pemulangan klien ke daerah asal, rujukan klien ke RSUD/RS Jiwa, dan pelayanan sosial lainnya.

Kendala pelayanan pada klien liposos adalah sarana prasarana yang kurang memadai untuk rumah penampungan klien, karena kapasitasnya tidak dapat menampung jumlah klien yang over load, belum tersedianya ruang klien untuk ODGJ, Penyakit Menular, Lansia, isolasi ODGJ Ekstrim, Ruang Kesehatan dan alat medis penanganan pertama pada klien, rumah singgah, Ruang konseling, ambulance, sarpras kebersihan klien, dan artesis.

Dok : Pemberian Permakanan pada Klien



Network: 31 Des 2024 17:28:29 WIB
 Local: 31 Des 2024 17:28:29 WIB
 8°10'37,608"S 113°40'25,344"E
 Jalan Tawes
 Kecamatan Kaliwates
 Kabupaten Jember
 Jawa Timur
 Remark: PLUR

Dok : Rujukan klien ke RSUD



Dok : Reunifikasi Klien



Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	923.780.000,-	799.032.500,-

Output	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	512	600
--------	---	-------	-----	-----

Pemberian bantuan kebutuhan dasar berupa bantuan paket sembako, alat kesehatan dan sandang pada penyandang disabilitas, anak yatim, anak PPKS dan lansia miskin, bantuan pelayanan social (rujukan, reunifikasi dan pemulangan ke daerah asal), dan kegiatan HDI (Hari Disabilitas Indonesia) dalam bentuk pelatihan ketrampilan berbasis pemberdayaan bagi disabilitas.

Dok : Hari Disabilitas Indonesia



Dok : Bantuan sembako pada lansia miskin



Dok : Bantuan sandang pada anak PPKS



Dok : Bantuan alkes pada disabilitas



Dok : Rujukan lansia sebatang kara



Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	152.820.000,-	102.787.500,-
Output	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	orang	300	300

Pemberian bantuan sembako pada fakir miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian bantuan paket sembako pada fakir miskin sejumlah 300 paket.

Dok : Pemberian bantuan paket sembako pada fakir miskin



Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	218.880.000,-	203.680.000,-
Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	67	67

Pemberian bantuan sembako pada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) adalah untuk membantu anak-anak dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka, dan Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian bantuan paket sembako pada 67 LKSA di Kabupaten Jember.

Dok : Pemberian bantuan paket sembako pada LKSA



2. Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	244.536.400,-	225.320.000,-
Output	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	orang	1.043.765	1.043.765

Dinas Sosial Kabupaten Jember bersama dengan PUSKESOS telah melaksanakan verval DTKS pada 1.043.765 jiwa, tujuan dilaksanakannya verval data tersebut adalah memperbaiki atau mengupdate DTKS di aplikasi SIKS-NG, memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dalam kriteria miskin dan layak mendapatkan bantuan sosial, menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial, dan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran.



Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	32.778.543.300,-	31.651.558.104,-
Output	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	orang	73.500	69.519

Kegiatan yang dilaksanakan adalah BLT DBHCHT, dan merupakan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan pemberian BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor tembakau. BLT DBHCHT juga bertujuan untuk: membantu pemulihan perekonomian daerah, Memberikan rasa keadilan, Meningkatkan motivasi buruh tani untuk tetap beraktivitas, Mengurangi beban buruh tani dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian BLT DBHCHT dengan target 73.500 orang dan terealisasi sejumlah 69.519 orang yang masing-masing mendapatkan BLT sebesar Rp. 400.000,-. Tidak memenuhi target dikarenakan calon penerima BLT tersebut ada yang meninggal, pindah alamat dan Alamat tidak diketemukan.

Dok : pemberian BLT DBHCHT



Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	78.800.000,-	32.150.000,-
Output	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	75	75

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat bersama dengan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Jember bertempat di Gedung B Jalan Tawes, bentuk kegiatan ini adalah bazar yang diikuti oleh PKH graduatif, dan merupakan salah satu wujud pecan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kabupaten Jember

Dok : Pemberdayaan ekonomi KPM PKH



3. Program : Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	12.000.000.000,-	9.706.937.779,-
Output	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5.000	5.000

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan bantuan kebutuhan dasar pada kelompok rentan/masyarakat terdampak bencana/korban bencana, antara lain : bantuan permakanan, sandang, bahan bangunan rumah, paket sembako, dapur umum darurat bencana dan bantuan lainnya

Dok : Pemberian bantuan masyarakat rentan/korban bencana





Sasaran 3 : Meningkatkan Restorasi Sosial

4. Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	216.838.000	192.192.000
Output	Jumlah TMP yang dirawat	TMP	15	15

Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan pemeliharaan di 15 (lima belas) Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Jember, antara lain pengecatan TMP, perbaikan tembok dan nisan TMP yang sudah tidak layak, dan perawatan lainnya. Untuk kegiatan hari-hari besar nasional dipusatkan di TMP Patrang, antara lain : kerja bakti bersama Kodim 0824/Jember dan jajaran lainnya, yang merupakan persiapan kegiatan renungan malam dan upacara dan kegiatan tabur bunga.

Dok : pelaksanaan upacara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka menghormati jasa para pahlawan



Dok : petugas TMP membersihkan Taman Makam Pahlawan



Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

5. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.241.340.296	3.571.577.261
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	12	12

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	76.416.200	76.416.000
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	44.109.400,-	42.650.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	154.136.700,-	86.814.331,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	320.290.000,-	214.665.681,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	64.587.819,-	64.587.819
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

d. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	5.000.000,-	3.205.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Dokumen	2	2

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	5.550.000,-	4.650.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	2400	2400

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	263.300.000,-	143.219.502,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	12	12

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.078.718.500	2.706.807.596
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	12	12

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	164.500.000,-	46.134.337,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	3	3

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	340.000.000,-	261.612.907,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	9	9

c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	45.000.000,-	27.975.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	15	15

c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	226.084.500,-	59.930.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	3	3

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Jember berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 57.923.611.115,- , melaksanakan 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial	80%	91.38%	Efisien
2. Meningkatnya penanganan perlindungan pemberdayaan sosial bagi PPKS	90%	92%	Efisien
3. Meningkatnya Restorasi Sosial	80%	88.85%	Efisien
4. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	90%	90.35 %	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial, dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya penanganan perlindungan pemberdayaan sosial bagi PPKS dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan kurang efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial						
Indikator 1.1	80%		√			
Indikator 1.2						
Rata rata capaian						
Sasaran 2 Meningkatnya penanganan perlindungan pemberdayaan sosial bagi PPKS	90%		√			
Indikator 1.1						
Indikator 1.2						
Sasaran 3 Meningkatnya Restorasi Sosial						
Indikator 1.1	88.85%		√			
Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	90.35%		√			
Rata rata capaian			√			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran ***meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial*** mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 80 %,

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan antara lain : kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan PSKS/penguatan tugas dan fungsi PSKS
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah mengusulkan tambahan anggaran pemberdayaan PSKS pada TAPD
- Rencana perbaikan kedepan : meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan PSKS untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi PSKS
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pemberdayaan lansia bekerja sama dengan PKK , Karang Werda, Veteran/LVRI dan PWRI Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan pemberdayaan sosial bagi PMKS

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran ***Meningkatnya penanganan perlindungan pemberdayaan sosial bagi PPKS*** mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90 %,

- **Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :**
 - 1). pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember belum mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan PPKS (pelatihan ketrampilan PPKS)
 - 2). terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial bidang rehabilitasi sosial dalam menangani PPKS, khususnya pelaksanaan pendistribusian bantuan PPKS ke wilayah
 - 3). data calon penerima bantuan yang belum akurat
- **Faktor pendorong keberhasilan antara lain :**
 - 1). meningkatkan upaya penanganan pelayanan PPKS dengan maksimal
 - 2). meningkatkan dukungan stakeholder/OPD terkait/pilar/PSKS dalam membantu penanganan PPKS
 - 3). meningkatkan verval data dan assessment calon penerima bantuan dengan melibatkan Puskessos/TKSK/Camat/Lurah/Desa/Perangkat Desa
- **Solusi terhadap kendala kedepan adalah :**
 - 1). mengalokasikan anggaran pelatihan ketrampilan bagi PPKS sesuai bakat dan kemampuan
 - 2). koordinasi dan sinergi dengan stakeholder/OPD terkait/pilar/PSKS dalam penanganan PPKS
 - 3). koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tentang program prioritas/bantuan PPKS yang diserahkan ke Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember
 - 4). koordinasi dan sinergi dengan Camat/Lurah/Desa, tentang usulan calon penerima bantuan dan verval data/assesment calon penerima bantuan di wilayah

- **Rencana perbaikan kedepan** : memaksimalkan anggaran penanganan PPKS, memaksimalkan tugas pokok dan fungsi personil maupun pilar, dan penggunaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan, dan peningkatan aksesibilitas, pelaksanaan monitoring, pengadministrasian dalam 1 (satu) data sesuai jenis/kategori PPK
- **Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain** : Kegiatan peringatan Hari Disabilitas Indonesia berupa pelatihan ketrampilan PPKS berbasis pemberdayaan bagi penyandang disabilitas bekerja sama dengan BLK Kabupaten Jember

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya restorasi sosial bagi mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 80 %,

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan antara lain : kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 15 TMP di Kabupaten Jember
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah mengusulkan tambahan anggaran pemeliharaan 15 TMP pada TAPD
- Rencana perbaikan kedepan : mengalokasikan anggaran perbaikan TMP, bersinergi dan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan perawatan dan kegiatan di TMP
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain : menjadikan TMP sebagai wisata edukasi/religi bekerja sama dengan OPD terkait.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.57.923.611.115,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.515.660.296 terealisasi sebesar Rp. 3.676.122.317,- (81.40 %)
2. Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 52.111.960.219,- terealisasi sebesar Rp. 46.810.549.445,- (89.82 %)
3. Belanja Modal sebesar Rp 1.295.990.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.092.383.000,- (84.28%).

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
1.	Program Pemberdayaan Sosial	820.205.000,-	749.503.800,-	91.38%
1.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	820.205.000,-	749.503.800,-	91.38%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545.245.000,-	493.543.800,-	90.52%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	274.960.000,-	255.960.000,-	93.09%

	Kabupaten/Kota			
2.	Program Rehabilitasi Sosial	2.755.653.000,-	2.423.221.070,-	88%
2.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.383.953.000,-	2.116.833.570,-	88.80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	251.600.000,-	207.200.000	82.35%
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.208.573.000,-	1.110.601.070,-	91.89%
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	923.780.000,-	799.032.500,-	86.50%
2.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	371.700.000,-	306.387.500,-	82%
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	152.820.000,-	102.787.500,-	67.26%
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	218.880.000,-	203.600.000,-	93%
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	33.101.881.700,-	31.667.074.624,-	95.67%
3.1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.101.881.700,-	31.667.074.624,-	95.67%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.538.400,-	7.080.000,-	2.90%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	32.778.543.300,-	31.627.844.624,-	96.49%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	78.800.000,-	32.150.000,-	40.80%

4.	Program Penanganan Bencana	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24%
		-		
4.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24%
		-		
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.000.000.000,-	9.628.981.710,-	80.24%
		-		
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63%
5.1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	216.838.000,-	192.192.000,-	88.63%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.029.033.415,-	8.126.130.074,-	90.35%
6.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.241.340.296,-	3.441.402.317,-	81.14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.241.340.296,-	3.441.402.317,-	81.14%
6.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.540.119,-	415.237.142,-	62.48%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.416.200,-	76.416.000,-	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.109.400,-	42.650.000,-	96.69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154.136.700,-	86.814.331,-	56.32%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.290.000,-	144.489.681,-	45.11%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.587.819,-	63.317.130,-	98.03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,-	1.550.000,-	31.00%
6.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.347.568.500,-	2.797.809.594,-	83.58%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.550.000,-	4.650.000,-	83.78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	263.300.000,-	129.859.606,-	49.32%

	dan Listrik			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.078.718.500,-	2.663.299.988,-	86.51%
6.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.584.500,-	350.853.505,-	45.24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.500.000,-	46.134.337,-	28.05%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.000.000,-	216.814.168,-	63.77%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,-	27.975.000,-	62.17%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.084.500,-	59.930.000,-	26.51 %
	JUMLAH	57.923.611.115,-	51.579.054.762,-	89.05%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 4 (empat) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori tinggi.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan pada masing-masing sasaran, adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial:

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan sosial
- 2) Kemampuan dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial

Permasalahan pada sasaran Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) :

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Data calon penerima bantuan masih belum akurat
- 3) Belum terlaksananya kegiatan yang mendorong kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Restorasi Sosial

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM Non ASN penjaga 15 Taman Makam Pahlawan yang perlu ditingkatkan
- 2). Sarana prasarana di TMP yang kurang memadai
- 3) Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 15 TMP di Kabupaten Jember

Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan baik itu rutin maupun program kegiatan prioritas yaitu bantuan dan pelayan sosial bagi PPKS;

2) Perencanaan kegiatan yang masih belum optimal khususnya untuk bantuan dan pelayanan sosial bagi PPKS.

kategori capaian dari indikator sasaran adalah sangat memuaskan , dan agar kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dengan hasil yang maksimal maka Dinas Sosial Kabupaten Jember :

- a. Mengadakan Bimtek/Pelatihan khusus bagi peningkatan SDM PSKS agar lebih optimal dalam membantu penanganan PPKS ;
- b. Mengadakan Bimtek bagi peningkatan SDM Karyawan ASN dan Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih optimal dan memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PPKS ;
- c. Peningkatan verifikasi dan validasi DTKS di 31 Kecamatan ;
- d. Peningkatan Assesmen calon penerima manfaat dengan turun langsung ke wilayah;
- e. Menyusun program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PPKS guna mewujudkan kemandirian PPKS
- f. Sinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar ikut berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PPKS
- g. Pengajuan tambahan anggaran pemeliharaan 15 TMP di Kabupaten Jember
- h. Menyusun agenda kerja proses perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan kegiatan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV ;
dan
- . Manajemen anggaran pada TW I s/d IV (monitoring dan evaluasi) juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2024 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi, dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2025.

Jember, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember



Akhmad Helmi Luqman, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19760507 199602 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. IKU OPD**
- 2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**
- 3. PERJANJIAN KINERJA**
- 4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**
- 5. MATRIKS RENSTRA TC 25**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS SOSIAL

Jl. PB. Sudirman Nomor 38 Telp. (0331) 487766 Jember

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

**KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 065/58/35.09.315/2024**

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760507 199602 1 004

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data PSKS
		<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSKS adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. PSKS merupakan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dapat berperan dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat kesejahteraan sosial. - PSKS berdaya adalah PSKS yang memenuhi kategori sebagai pendamping sosial dalam membantu penanganan PPKS yakni yang bertanggung jawab, berkompeten dan mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai pilar yang sangat strategis dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang sosial 		
Meningkatnya Penanganan Perlindungan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Menerima Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100\%$	6. Bidang Rehabilitasi Sosial 7. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 8. Bidang Penanganan Bencana 9. UPT Liposos	<ul style="list-style-type: none"> • Data disabilitas, lansia, anak PPKS, anak yatim, gelandangan pengemis, dan fakir miskin yang

				menerima bantuan kebutuhan dasar * Data liposos
		<p>Penjelasan : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan wajar. Hal ini disebabkan oleh hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial.</p> <p>- Jenis jenis PMKS : PMKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anak balita terlantar -Anak terlantar -Anak yang berhadapan dengan hukum -Anak jalanan -Anak dengan disabilitas -Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah -Anak yang memerlukan perlindungan khusus -Lanjut usia terlantar -Penyandang disabilitas -Tuna susila -Gelandangan -Pengemis -Pemulung -Kelompok minoritas -Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan -Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) -Korban penyalahgunaan NAPZA -Korban trafficking -Korban bencana alam -Korban bencana sosial 		

		<ul style="list-style-type: none"> - PPKS yang menerima Kebutuhan Dasar adalah PPKS yang menerima bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah berupa : - bantuan jaminan kesehatan (PBID/PBIJKN) - bantuan Program Keluarga Harapan - bantuan pangan non tunai - bantuan permakanaan - bantuan paket sembako - bantuan alat kesehatan - bantuan sandang, dan - bantuan langsung uang tunai/BLT-DBHCHT 		
Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	<p>Formulasi Kebijakan :</p> $\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dirawat}}{\text{Jumlah Keseluruhan Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data TMP di Kab Jember
		<p>Penjelasan :</p> <p>TMP yang dirawat adalah TMP yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember. Pemeliharaan/perawatan antara lain : pengecatan pagar TMP, nisan dan bangunan TMP, pembenahan pagar dan bangunan yang ada di TMP</p>		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Program adalah program yang ada didalam DPA –PD, baik itu 1 (satu) program rutin maupun 5 (lima) program prioritas</p>	Sekretariat	- Data LRA -Data Lap SIPPD

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

MISI		TUJUAN RPJMD			INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD			INDIKATOR SASARAN			
Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah		Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya			Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Minimal			
TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN	
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada PMKS	1500 orang	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1500 orang	755.500.000	
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	639.000.000	
		Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90,2%	Program Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	90,3%	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	295.000.000	
								Penyediaan Alat Bantu Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewangan Kabupaten/Kota	100 Orang	265.000.000	
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1.475.000.000	

								Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	512 Orang	295.250.000		
								Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	102.500.000		
								Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	395.750.000		
								Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	250.000.000		
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25000 Orang	5.000.000.000		
								Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	67 Dokumen	325.000.000		
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	90,3%	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	665.250.000
								Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	640.750.000		

								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	397140 Keluarga	1.300.000.000
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63335 Keluarga	20.339.436.925
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	208.499.000
					Program Penanganan Bencana	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Bencana	90,3%	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	895 Orang	620.000.000
		Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang Dirawat	15 TMP	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Tamakn Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	825 Makam	283.979.680
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	94.200.000
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	4.541.485.271
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.740.500
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.839.700
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	68.931.600
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	350.000.000

								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.271.497
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.750.000
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	850.000.000
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	80.000.000
								Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	100%	300.000.000
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Laporan	5.550.000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	274.080.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.425.086.100
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	116.118.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	374.900.000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	40.000.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.071.039.625



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS SOSIAL

JL. Tawes Nomor 306 Telp (0331) 487766 Jember

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 28 Januari 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90,3 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.923.185.415,-	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 820.205.000,-	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.755.653.000,-	APBD
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 33.101.881.700,-	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 12.000.000.000,-	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 216.838.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 57.817.764.115,-	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jember, 26 Januari 2024
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER**

AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS SOSIAL

JL. Tawes Nomor 306 Telp (0331) 487766 Jember

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %
2.	Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	90,3 %
3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.029.033.415	P-APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 820.205.000,-	P-APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.755.653.000,-	P-APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 33.101.881.700,-	P-APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 12.000.000.000,-	P-APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 216.838.000,-	P-APBD
	Jumlah	Rp. 57.923.611.115,-	

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng



Jember, 28 November 2024
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JEMBER**

AKHIMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
NIP. 19760507 199602 1 004

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial lainnya	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	90 %	90.2 %	90.2 %	90.4 %	90.4 %	90.4 %	1.Strategi Pemberdayaan Sosial 2.Strategi Kemitraan Sosial 3.Strategi Pendampingan Sosial	-Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola pemberdayaan yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejah sosial; -Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat; -Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha.	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana

		2.	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Berdaya	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %			- Program Pemberdayaan Sosial
		3.	Meningkatnya Restorasi Sosial	Jumlah TMP yang Dirawat	15 TMP	15	15	15	15	15			- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		4.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%			- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

